

Penerapan Akuntansi AkruaI Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Berstatus Badan Layana Umum

Dwi Sulistiani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No.50, Malang, 65144, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Accrual accounting, PTKIN, BLU, and Disclosure

Kata Kunci:

Akuntansi akrual, PTKIN, BLU, dan Pengungkapan

ISSN (print): 2598-7763

ISSN (online): 2598-7771

✉ Corresponding Author:

Dwi Sulistiani:

Tel. /Fax.

dwisulistiani@pips.uin-malang.ac.id



Abstract

This study aims to determine the extent to which the accrual basis of PTKIN has BLU status. The object of this case study research with an interpretive paradigm is one of the best UINs in Indonesia. This research contributes to accounting standard setters and policy makers in government in the preparation of accounting standards. The results showed that PTKIN with BLU status had not yet fully implemented accrual accounting. In terms of definition and presentation, it has been carried out in accordance with SAP and SAK. However, the recognition, measurement, recording and disclosure still use a combination of cash basis and accrual basis. The use of accounting software "SAIBA" is proven to help in the application of accrual accounting. However, there are obstacles in the application of accrual accounting, namely: lack of competence of human resources who understand accounting, preparation of financial statements based on SAK that still uses excel applications and financial rules that change frequently. Therefore it is necessary to conduct accrual accounting training, create accounting applications based on SAK and always upgrade the rules of the ministry of finance.

Citation: Sulistiani, D., (2021). Penerapan Akuntansi AkruaI Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Berstatus Badan Layana Umum. AFRE Accounting and Financial Review, 4(1): 18-28

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan akrual basis pada PTKIN berstatus BLU. Objek penelitian studi kasus dengan paradigma intepretif ini adalah salah satu UIN terbaik di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penyusun standar akuntansi dan pengambil kebijakan di pemerintahan dalam penyusunan standar akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTKIN berstatus BLU masih belum menerapkan akuntansi akrual sepenuhnya. Dalam hal definisi dan penyajian sudah dilakukan sesuai dengan SAP dan SAK. Namun pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pengungkapan masih menggunakan kombinasi antara basis kas dan basis akrual. Penggunaan software akuntansi "SAIBA" terbukti membantu dalam penerapan akuntansi akrual. Namun, terdapat kendala dalam penerapan akuntansi akrual yaitu: kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang paham akuntansi, penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK yang masih menggunakan aplikasi excel dan aturan keuangan yang sering berubah. Oleh karena perlu melakukan pelatihan akuntansi akrual, membuat aplikasi akuntansi yang berbasis SAK dan selalu upgrade aturan kementerian keuangan

JEL Classification: H60, H83

DOI: <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5958>

1. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengatur teknis aturan terkait penyusunan laporan keuangan. PP tersebut mewajibkan instansi pemerintah di Indonesia untuk menggunakan akuntansi akrual paling lambat 5 tahun setelah aturan diatas diterbitkan. Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel menuntut pemerintah menyusun serta menyajikan laporan keuangan publiknya sesuai pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam SAP No. 01 menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah. Semua informasi tersebut digunakan oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah tetapi yang paling penting penyajian laporan keuangan pemerintah ini merupakan pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap masyarakatnya sebagai sumber dana.

Tujuan itulah yang menyebabkan diperlukannya sebuah standar yang paling tidak harus dimiliki oleh laporan yang dibuat pemerintah, standar ini juga memuat pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Persyaratan minimum yang harus dipenuhi laporan keuangan pemerintah paling tidak adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hal tersebut disebabkan karena organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menggunakan sumber dana publik, sehingga harus memberikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas. Universitas harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik dari laporan keuangan.

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari laba, melainkan untuk memaksimalkan pelayanan (Choirudin, 2018; Arifin, 2020; Hastuti *et al.*, 2021; Andriani & Setyowati, 2021). Beberapa organisasi yang termasuk dalam kategori organisasi sektor publik adalah: institusi pendidikan, institusi kesehatan, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi politik, organisasi sosial keagamaan, dan lain sebagainya. Institusi pendidikan di bawah Kementerian Agama terdiri dari: perguruan tinggi islam baik negeri atau swasta, madrasah baik negeri atau yang swasta, serta

pondok pesantren baik yang modern ataupun yang salafiyah. Terdapat 3 jenis status pada perguruan tinggi dibawah Kementerian Agama, yaitu: BLU (UIN), IAIN dan STAIN. Perguruan Tinggi tersebut harus menerapkan metode akrual basis dalam pencatatan akuntansinya.

Penelitian sebelumnya menemukan banyak institusi pendidikan yang belum menggunakan standar akuntansi yang seharusnya (Harun & Kamase, 2012; Sulistiani, 2019a; Sulistiani, 2020). Mereka memiliki alasan yang berbeda-beda untuk tidak menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Sebagian karena sumber daya yang kurang dan sebagian lagi karena nilai-nilai dalam institusi tersebut yang menganggap bahwa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi bukanlah hal yang penting. Karena yang lebih penting dari sebuah laporan keuangan adalah kejujuran dan amanah dalam membuatnya. Penelitian lain menunjukkan bukti bahwa implementasi akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas kinerja organisasi sektor publik (Santoso & Pambelum, 2008). Selain itu, juga dibuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang berarti meningkatnya akuntabilitas publik (Novianta, 2018; Polzer *et al.*, 2019; Ratmono & Sutrisno, 2019). Berdasarkan penelitian diatas menegaskan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan yang menuntut adanya penyusunan laporan keuangan dengan metode *accrual basis* sangat mempengaruhi akuntabilitas publik.

Penelitian ini menggunakan situs penelitian yaitu satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Berstatus BLU yang bernama Universitas Islam Negeri (UIN). Perguruan Tinggi ini bisa menjadi perwakilan dalam menunjukkan bagaimana penerapan *accrual basis* pada Perguruan Tinggi Islam Berstatus BLU di Indonesia. UIN ini dipilih karena pernah mendapatkan penghargaan sebagai pengelola BLU terbaik, PTKIN terbaik versi *webometrik* dan prestasi lainnya, sehingga layak untuk dijadikan sampel dalam penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual di PTKIN. Berdasarkan fakta tersebut perlu dilakukan penelitian terkait penyusunan laporan keuangan pada perguruan tinggi berstatus BLU di Indonesia khususnya yang dibawah Kementria Agama untuk mengevaluasi implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi keuangan (SAK). Implementasi akuntansi akrual mencakup pada keseluruhan proses penyusunan laporan keuangan baik mengenai definisi, pe-

ngakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian maupun pengakuan.

2. Literatur Review

Sebuah penelitian studi kasus dalam sektor publik Inggris yang lebih luas menemukan bahwa implementasi aktual dari akuntansi akrual sangat berbeda, pada dasarnya, dalam biaya dan dalam hal waktu, dengan yang disajikan dalam publikasi pemerintah praimplementasi (Connolly & Hyndman, 2006). Sementara institusi pendidikan di bawah pondok pesantren salafiyah masih belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi. Hal tersebut karena nilai-nilai kejujuran dan amanah yang tinggi disana sehingga laporan keuangan bukan menjadi hal yang sangat penting untuk dipermasalahkan. Kepasrahan terhadap Allah sebagai Maha Pemberi Rejeki menjadi salah satu hal tidak diterapkannya standar akuntansi disana, selain itu rendahnya sumber daya manusia juga menjadi alasan lainnya (Sulistiani, 2020). Sementara studi kasus pada perguruan tinggi negeri berstatus BLU UIN Maulana Malik Ibrahim masih belum menerapkan akuntansi akrual dalam penyusunan laporan keuangannya (Sulistiani, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Larasati, 2016; Nurmalasari *et al.*, 2019) menunjukkan hasil bahwa catatan dan keuangan masih belum dikelola dengan baik oleh yayasan pendidikan swasta ataupun pondok pesantren. Laporan keuangan juga belum disusun sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya.

Hasil penelitian Novianta (2018) menunjukkan adanya pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut juga membuktikan adanya pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan pada lembaga tersebut setelah penerapan SAP, dengan dukungan pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB, serta ketersediaan sarana dan prasarana mengalami peningkatan kualitas yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 oleh BPK-RI diberikan opini tidak memberikan pendapat, disebabkan antara lain kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kelemahan

prosedur pencatatan karena kurangnya pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB dalam menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan SAP. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap standar akuntansi sangatlah penting dalam peningkatan kualitas yang berujung pada peningkatan akuntabilitas publik.

Temuan enelitian yang dilakukan Santoso & Pambelum (2008) memberikan bukti bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik secara partial maupun secara bersama-sama. Sedangkan Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* baik secara partial maupun secara bersama-sama.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Polzer *et al.*, 2019) yang bertujuan untuk memberikan overviu global terkait penerapan IPSAS (*International Public Sector Accounting Standard*) baik di Negara berkembang maupun Negara maju. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dikarenakan pengalaman dan pengetahuan, juga ketercapaian reformasi akuntansi dalam menghadapi tantangan untuk mengimplementasikan IPSAS. Diperlukan pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan dengan bahasa yang mudah dipahami serta perlu adanya monitoring apakah organisasi pemerintahan tersebut telah menerapkan *value for money* (ekonomis, efektif dan efisien) dalam penerapannya.

Ratmono & Sutrisno (2019) meneliti 171 responden di kementrian menunjukkan adanya pengaruh positif antara regulasi keuangan, kualitas sumberdaya manusia, reliabilitas pengendalian internal dan penggunaan tehnologi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan kementirian dan institusi. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepatuhan terhadap aturan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini merupakan harapan dari *stakeholder* tentang akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban manajemen terhadap masyarakat. Meskipun demikian, peningkatan implementasi aturan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kualitas akuntabilitas laporan keuangan. Kualitas sumber daya manusia yang kompeten memberikan dukungan dalam pencapaian tersebut. Sistem pengendalian inter-

nal juga memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan, hal tersebut sangat penting dalam memberikan kepastian proses bisnis untuk mencapai tujuan. Penggunaan teknologi dalam penyusunan laporan keuangan juga tidak kalah pentingnya, laporan keuangan yang baik tidak bisa lepas dengan penggunaan teknologi yang baik pula.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah adalah sebagai berikut (SAP, 2010): 1) Komitmen pimpinan dan staf di institusi pemerintahan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara akuntabel. 2) Penggunaan sumberdaya diatur secara konsisten dengan perundang-undangan dengan menggunakan sistem yang mendukung. 3) Tujuan dan sasaran harus dapat dijumpukan. 4) Ditujukan untuk mencapai visi dan misi juga menggunakan prinsip *cost and benefit*. 5) Melakukan pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan keuangan yang jujur, objektif, transparan dan aktif sebagai katalisator perubahan.

Penyajian laporan keuangan yang relevan dan andal sangat dibutuhkan untuk bisa memperbaiki praktik pengelolaan pemerintahan selama ini. Jika hal tersebut bisa diwujudkan, maka akan bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintahan. Namun, hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan, banyak kendala yang harus dihadapi dalam mewujudkan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel. Hambatan tersebut karena penyajian laporan keuangan yang jauh dari objektivitas, tepat waktu, konsistensi, ekonomis, daya banding dan ketepatan waktu dalam.

Pada LO, Pendapatan wajib diklasifikasi berdasar sumber pendapatan (Paragraf 23 PSAP 12, Lampiran I PP 71/2010). Sumber pendapatan dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar jenis pendapatan, yaitu (1) pendapatan pajak, (2) pendapatan bukan pajak, dan (3) pendapatan hibah, sesuai Paragraf 24 Lampiran 1.13 PSAP 12, PSAP Pendapatan mungkin juga melakukan penjelasan berdasar klasifikasi pendapatan non-transaksi dan pendapat berbasis transaksi agar sesuai IPSAS dan Bultek Pendapatan CTA/*Full Accrual*.

Pendapatan-LO diakui (tergantung mana yang lebih dahulu terjadi; penerimaan kas atau hak tagih) (1) pada saat diterima (Paragraf 22) atau (2) pada saat timbulnya hak atas pendapatan sesuai Paragraf 19 Lampiran 1.13 PSAP 12, pada saat hak menagih pendapatan sesuai Paragraf 20 Lampiran 1.13 PSAP 12, karena itu pengakuan

akuntansi pendapatan berbasis penerimaan KUN/KUD merupakan penyimpangan standar berbasis akrual paripurna.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Implementasi akuntansi akrual bagi satuan kerja pemerintahan baik kementerian/ lembaga, pemerintah daerah ataupun satuan kerja BLU diatur dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Data dan Metode

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus dari satu objek penelitian (*study case*) dengan paradigma interpretif yang didasarkan pada interpretasi masing-masing informan terkait penerapan akuntansi akrual. Penelitian ini menggunakan data primer yang terdiri dari: observasi (terstruktur dan partisipan) serta wawancara (terstruktur dan tidak terstruktur). Observasi dilakukan dengan mengamati partisipan baik dalam sikap, tindakan dan kebiasaan yang dilakukan terkait dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pelaporan keuangan. Wawancara dilakukan pada kepala bagian keuangan, bagian akuntansi serta operator SAIBA dan SAK UIN. Selain itu juga menggunakan data sekunder berupa: dokumentasi, catatan dan kepustakaan. Dokumentasi berupa bukti-bukti transaksi akuntansi, buku jurnal, buku besar dan laporan keuangan yang ada. Catatan yang dilakukan berupa log book yang merupakan catatan harian bagi peneliti. Kepustakaan terdiri dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal penelitian dan standar akuntansi yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan di perguruan tinggi berstatus BLU.

Validitas dan reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dengan mengkonfirmasi antar informan dan triangulasi metode dengan membandingkan antar data wawancara dengan observasi ataupun dokumentasi. Reliabilitas dilakukan dengan menanyakan pertanyaan yang sama pada satu informan pada waktu yang ber-

beda. Tahap penelitian yang dilakukan sesuai dengan model Yin (2003). Dimulai dengan mendefinisikan dan merancang penelitian. Selanjutnya menyiapkan, mengumpulkan dan menganalisis data. Terakhir adalah menganalisis dan menyimpulkan.

Penelitian ini dilakukan pada UIN "X", nama sengaja disamarkan atas permintaan Informan. Seperti dijelaskan di pendahuluan bahwa UIN yang dijadikan sampel tersebut merupakan UIN yang terbaik di Indonesia dengan beberapa

pertimbangan seperti yang dijelaskan dalam Pendahuluan.

4. Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa UIN masih belum sepenuhnya mengimplementasikan akuntansi akrual dalam menyusun laporan keuangannya. Hasil wawancara mengenai definisi akun dalam akuntansi menurut Kepala Bagian Keuangan UIN "X" disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Definisi

No	Akun	Definisi
1	Persediaan	Ada 2 macam persediaan: pertama, sebagai perlengkapan misalnya ATK, bahan pemeliharaan, dll. Kedua, yang diserahkan mahasiswa berupa almamater, buku pedoman, kasur & bantal untuk di mahad, dsb.
2	Investasi	Investasi berupa bangunan ruko, kantin, gedung, tanah, bis, hiace dan mobil yang disewakan.
3	Aset Tetap	Aset tetap masuk dalam klasifikasi belanja modal yang meliputi: Modal tanah, Modal peralatan & mesin, Modal gedung & Bangunan, Modal Fisik Lainnya.
4	Kewajiban	Kewajiban adalah biaya yang masih belum dibayar/terbayar pada saat periode akuntansi berakhir, sehingga timbul kewajiban/ hutang yang akan dibayar pada tahun berikutnya.
5	Pendapatan	Pendapatan yang berasal dari Jasa layanan pendidikan diantaranya; SPP, Wisuda, Registrasi, dsb. Kemudian yang berasal dari Pendapatan hibah, Pendapatan jasa usaha lainnya yang diantaranya dari hasil sewa, pengembangan kelembagaan & Mahad dsb. Kemudian yang berasal dari Jasa layanan perbankan dan yang berasal dari hasil kerjasama yang kita laporkan ke Negara dalam bentuk pengesahan sebagai pendapatan tiap bulan diterima.
6	Beban	Belanja adalah bentuk pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan operasional, belanja Operasi, belanja pegawai dan Belanja Modal. Sedangkan beban, adalah beban untuk penyusutan aset atau nilai manfaat dalam suatu periode.

Berdasarkan data hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala bagian keuangan sudah memahami terkait definisi akun dalam akuntansi. Terbukti bahwa definisi yang dijelaskan secara garis besar sudah sesuai dengan SAP dan SAK.

Pemahaman terkait definisi diperlukan sebelum menyusun laporan keuangan lebih lanjut. Selanjutnya terkait pengakuan, peneliti melakukan wawancara pada operator SAIBA dan SAK kemudian mengkolaborasi jawaban mereka, selanjutnya dipaparkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Pengakuan

No	Akun	Pengakuan
1	Persediaan	Diakui saat SP2D keluar dan dibayarkan pada supplier
2	Investasi	Diakui saat SP2D keluar dan dibayarkan pada supplier, jika dilakukan secara termin, maka pengakuan sesuai dengan termin pembayaran.
3	Aset Tetap	Pengakuan aset tetap dilakukan pada saat hak kepemilikan telah berpindah. setiap aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun dan dapat dinilai manfaat ekonomi masa depannya
4	Kewajiban	Kalau untuk pengakuan kewajiban adalah sebesar biaya yang masih belum terbayarkan, atau saat timbul kewajiban belum dibayarkan.
5	Pendapatan	Pengakuan pendapatan sebenarnya harus menggunakan akrual basis. Akan tetapi untuk saat ini kita masih menggunakan kas basis karena faktor dilapangan belum tertata untuk bisa mengakrualkan
6	Beban	Belanja dan beban adalah segala transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan kita laporkan ke Negara dalam bentuk pengesahan sebagai belanja Perbulan

Berdasarkan data wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait pengakuan (kapan mengakui suatu transaksi akuntansi), operator SAIBA dan SAK memberikan jawaban yang beragam

Ada diantaranya yang diakui masih dengan metode berbasis kas dan ada sebagian yang sudah menggunakan basis akrual. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengakuan di UIN masih belum

sepenuhnya menggunakan basis akrual. Hasil wawancara dengan operator SAIBA dan SAK UIN X disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Pengukuran

No	Akun	Pengukuran
1	Persediaan	Diukur sebesar harga perolehan atau harga pokok produksi jika diproduksi sendiri
2	Investasi	Diukur sebesar harga perolehan atau harga pokok produksi jika diproduksi sendiri
3	Aset Tetap	Aset tetap yang dimiliki dicatat sebesar biaya perolehan pada saat hak milik aset tersebut diterima
4	Kewajiban	Untuk pengukuran kewajiban dicatat sebesar kewajiban yang diterima atau nilai nominal
5	Pendapatan	Kalau untuk pengukurannya, pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan atau jumlah bruto
6	Beban	Diukur sebesar nilai yang direalisasikan dengan memperhitungkan seluruh pengeluaran untuk belanja dan beban.

Hasil wawancara pada tabel 3 memberikan gambaran bahwa dalam hal pengukuran, penyusun laporan keuangan di UIN mengukurnya secara beraneka ragam. Ada yang diukur menggunakan nilai historis, nilai bruto, nilai nominal dan juga nilai pasar. Hasil ini menunjukkan bahwa pengukurannya sudah sesuai dengan

SAP namun Sebagian masih belum sesuai dengan SAK yang seharusnya menggunakan nilai pasar. Tabel 4 memberikan hasil wawancara mengenai pencatatan atau jurnal yang dibuat. Wawancara dilakukan kepada operator SAIBA dan SAK di UIN "X".

Tabel 4. Pencatatan

No	Akun	Pencatatan
1	Persediaan	Beban persediaan xxx Kas xxx
2	Investasi	Investasi xxx Kas xxx
3	Aset Tetap	Pencatatan dilakukan berupa jurnal yang diinput pada aplikasi SAIBA, SAK dan Aset BMN. Penyusunan menggunakan metode garis lurus. Bangunan dibayar sesuai SPK per termin dengan metode prosentase penyelesaian.
4	Kewajiban	Beban jasa xxx Utang kepada pihak ketiga xxx
5	Pendapatan	Jurnal umum untuk Pendapatan pajak LO (basis akrual): Piutang Pajak xxx Pendapatan pajak xxx Jurnal umum untuk Pendapatan pajak LRA (basis kas): Akun antara xxx Pendapatan pajak xxx
6	Beban	Belanja pemeliharaan xxx Kas xxx

Berdasarkan data menunjukkan bahwa jurnal yang dibuat oleh penyusun keuangan di UIN mayoritas masing menggunakan basis kas, meskipun sudah ada yang dicatat dengan ber-

basis akrual (Tabel 4). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pencatatan sudah sesuai dengan SAP namun Sebagian belum sesuai dengan SAK.

Tabel 5. Penyajian

No	Akun	Penyajian
1	Persediaan	Disajikan di LO sebagai beban perlengkapan
2	Investasi	Disajikan di Neraca di sisi asset, jika ada keuntungan atau kerugian disajikan di LO
3	Aset Tetap	Disajikan pada Neraca di sisi asset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap
4	Kewajiban	Disajikan di Neraca disisi kewajiban disesuaikan jangka waktunya (pendek atau panjang)
5	Pendapatan	Disajikan kedalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Dimana dalam penyajian Pendapatan-LRA, disajikan dalam jumlah mata uang rupiah sesuai dengan sumber pendapatan. Sedangkan penyajian pendapatan-LO, disajikan dengan merinci per jenis pendapatannya.
6	Beban	Disajikan kedalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Dimana dalam penyajian Beban-LRA, disajikan dalam jumlah mata uang rupiah sesuai dengan sumber pendapatan. Sedangkan penyajian Beban-LO, disajikan dengan merinci per jenis bebannya.

Mengenai penyajian, hasil wawancaranya dapat ditunjukkan pada Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa secara penyajian operator SAIBA dan SAK telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang se-

harusnya yaitu berdasarkan SAP dan SAK. Hal ini terjadi karena adanya dukungan software yang mereka gunakan. Selanjutnya terkait pengakuan, hasil wawancara kepada operator SAIBA dan SAK dapat dipaparkan pada tabel 6.

Tabel 6. Pengungkapan

No	Item	UIN B
1	Persediaan	Diungkapkan di CALK, mengungkapkan kebijakan akuntansi persediaan yang dipakai, metode perhitungan persediaan dan rincian detail jenis persediaan.
2	Investasi	Diungkapkan di CALK informasi terkait jenis investasi, metode akuntansi yang digunakan dan nama supplier
3	Aset tetap	Informasi terkait metode aset tetap dan informasi penting lainnya disajikan dalam CALK. Mengungkapkan metode penyusutan aset tetap, macam-macam aset tetap serta nama supplier
4	Kewajiban	Informasi yang diungkap untuk kewajiban jangka panjang berupa nama pemberi pinjaman, skedul pinjaman dan jumlah pinjaman. Sedangkan untuk kewajiban jangka pendek meliputi informasi macam-macam kewajiban dan nilainya. Untuk keduanya mengungkap metode akuntansi yang digunakan
5	Pendapatan	Diungkapkan dalam CALK mengenai metode akuntansi yang digunakan dan rincian pendapatan
6	Beban	Diungkapkan dalam CALK mengenai metode akuntansi yang digunakan dan rincian beban

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh penyusun laporan keuangan di UIN masih belum lengkap. Masih ada beberapa item yang harus diungkapkan secara lebih rinci dan detail sesuai dengan permintaan standar akuntansi yaitu SAP dan SAK. SAP diterapkan lebih baik dibandingkan SAK pada PTKIN berstatus BLU dikarenakan beberapa alasan seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bagian UIN "X" saat wawancara berikut ini:

"Penerapan SAP dibantu menggunakan aplikasi "SAIBA" yang diperoleh dari Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh semua satuan kerja pemerintah di wilayah Indonesia. Sedangkan penerapan SAK pada PTKIN berstatus BLU belum didukung oleh aplikasi khusus, melainkan masih menggunakan excel. Selain itu juga keterbatasan sumber daya manusia di kampus kami, salah satunya adalah kurangnya kemampuan operator mengenai akuntansi, juga menjadi kendala tersendiri. Belum lagi aturan dari kementerian keuangan yang sering berubah terkait penyusunan laporan keuangan."

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masih terdapat kendala bagi PTKIN berstatus BLU dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual, seperti yang diamanahkan dalam SAP dan SAK. Penggunaan aplikasi akuntansi memegang peranan penting dalam penerapan SAP. Namun masih terdapat kendala dalam penerapannya yaitu kompetensi sumber daya manusia yang masih

kurang khususnya pemahaman dalam akuntansi serta sering berubahnya aturan kementerian keuangan dan juga SAK yang membuat operator harus terus update informasi dan terus belajar. Sedangkan berdasarkan pengamatan atau observasi menunjukkan hal yang mendukung hasil wawancara diatas. Selain itu budaya pesantren di PTKIN berstatus BLU masih sangat kental, dimana semua keputusan dan perubahan sedikit banyak tergantung pada pimpinan. Pemahaman pimpinan akan aturan dalam menyusun laporan keuangan juga akan sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi akrual.

5. Pembahasan

Terdapat 15 faktor yang mempengaruhi implementasi IPSAS berbasis akrual. Faktor-faktor tersebut adalah pengalaman staf, pemahaman, keterampilan, kebutuhan pelatihan *in-house*, keterlibatan akuntan profesional, harapan untuk peluang bisnis di masa depan, publikasi laporan keuangan dengan format standar, sanksi oleh otoritas pengatur, tekanan dari mitra pembangunan dan kebijakan implementasi yang memadai (Matekele & Komba, 2020). Akuntansi akrual diyakini memiliki kekuatan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan dan memberikan manajemen *asset* dan liabilitas yang lebih baik. Sebagian besar negara maju yang telah berhasil mengadopsi akuntansi akrual menemukan bahwa proses perubahan harus dikelola dengan baik untuk

memastikan keberhasilan penerapan sistem akuntansi baru. Selain itu komitmen manajemen puncak dan tingkat kesiapan juga diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi program perubahan kepada pembuat kebijakan dan pejabat senior, rencana aksi terperinci untuk kementerian, manajemen risiko, serta analisis kesenjangan pada sumber daya manusia dan kebutuhan teknologi informasi (Hasan *et al.*, 2013). Penerapan *model specifier/provider* membutuhkan peran dan tugas yang jelas, komitmen pada peningkatan layanan, dan perangkat komunikasi yang penting. Penambahan sub divisi mempersulit organisasi untuk mengakses sumber daya manusia sehingga komunikasi kurang efektif dan menimbulkan tekanan bagi karyawan (Ryan *et al.*, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa akuntansi akrual masih belum diterapkan sepenuhnya oleh UIN berstatus BLU. Penyusunan laporan keuangan dengan accrual basis di Indonesia dilakukan akibat adanya tekanan global dari Bank Dunia dan IPSAS (Jayasinghe *et al.*, 2015) selain itu juga reformasi akuntansi yang dilakukan di Negara maju (Harun *et al.*, 2020). Proses adaptasi IPSAS di Indonesia dilakukan dengan mengadopsi sebagian dari IPSAS sebelum nantinya akan dilaksanakan sepenuhnya. Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan (Aversano *et al.*, 2019; Argento *et al.*, 2020)

Penggunaan aplikasi SAIBA membantu para operator penyusun laporan keuangan di PTKIN berstatus BLU untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP. Sementara, karena penyusunan laporan keuangan BLU yang disusun berdasarkan SAK, tidak menggunakan software khusus, sehingga cenderung lebih sulit untuk diterapkan. Universitas di Indonesia telah sukses dalam melakukan transformasi pelaporan keuangan berbasis akrual mulai tahun 2017 seiring dengan dikeluarkannya PMK No. 222 tahun tahun 2016 yang memberikan pedoman penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SAIBA (Wibowo & Varikha, 2018). Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kesuksesan reformasi pengelolaan keuangan tergantung pada ketegasan pemerintah dalam pelaksanaannya (Harun *et al.*, 2015). Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian di Afrika selatan yang masih sangat lambat dalam merespon perubahan sistem yang baru dengan menggunakan metode *accrual basis* (van Wyk, 2019). Faktor penting lainnya adalah penyediaan sumber daya yang memadai, seperti sistem teknologi informasi (TI) yang mem-

berikan informasi akuntansi yang mudah diakses dan akurat. Sedangkan struktur organisasi tidak menjadi penghalang utama reformasi (Nitzl *et al.*, 2020).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi akrual telah diterapkan pada Sebagian proses penyusunan laporan keuangan, meskipun belum keseluruhan. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan dasar PMK No. 76 tahun 2008 masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaan, sumber daya dan kelengkapan yang belum mendukung serta pengawasan terhadap proses yang masih lemah (Ariyati *et al.*, 2016); Hermansyah, 2016). Sementara studi kasus pada perguruan tinggi negeri berstatus BLU masih belum menerapkan akuntansi akrual dengan benar dalam penyusunan laporan keuangannya (Sulistiani, 2019; Sulistiani, 2020). Penelitian oleh Najati *et al.*, (2016) memberikan hasil Penggunaan aplikasi SAIBA tidak berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual sebab kurangnya pengetahuan operator tentang penyusunan jurnal penyesuaian dan pengembangan aplikasi SAIBA yang tidak melibatkan pengguna. Pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual, selain itu budaya organisasi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual (Zawitri, dkk, 2015)

Implementasi akuntansi akrual di UIN ini juga membutuhkan biaya serta waktu yang lebih banyak, hal tersebut sesuai dengan penelitian (Connolly & Hyndman, 2006; Jayasinghe *et al.*, 2015). Implementasi akuntansi akrual bukanlah proses yang mudah dilakukan perlu ada yang dikorbankan baik dari segi waktu dan biaya, apalagi jika proses transformasi itu masih berjalan dan belum berakhir, akan terus ada perbaikan yang terus menerus. Selain itu biaya audit juga meningkat dengan adanya perubahan metode akuntansi *accrual basis* (Botica Redmayne *et al.*, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Ratmono dan Sutrisno (2019) menunjukkan adanya pengaruh positif antara regulasi keuangan, kualitas sumberdaya manusia, reliabilitas pengendalian internal dan penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian dan institusi. Penelitian tentang penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual telah dilakukan sebelumnya antara lain penelitian yang dilakukan oleh Permana (2016) memberikan hasil lebih berfokus pada kestabilan aplikasi. Penelitian oleh Susanti, dkk (2016) memberikan hasil pada

kesesuaiannya dengan prosedur yang ada di PMK 270/PMK-.05/2014.

Penerapan akuntansi akrual di UIN masih memerlukan peningkatan efisiensi, hal tersebut senada dengan penelitian sebelumnya (Hood dan Dixon, 2016; Kirkpatrick, *et al.*, 2019). Namun setelah ada komitmen untuk transformasi di UIN ini, perubahan yang terjadi relatif cepat dan pelaporan keuangan lebih efektif dalam memberikan informasi keuangan secara real time. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (van Wyk, 2019). Kesuksesan implementasi akuntansi akrual juga dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan dan monitoring, hal tersebut senada dengan hasil penelitian (Polzer *et al.*, 2019).

Pada penerapan akuntansi akrual di UIN berstatus BLU, terdapat kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam hal akuntansi. Hal tersebut senada dengan penelitian sebelumnya yang Menyusun laporan keuangan di pemerintahan dengan tidak berbasis akrual, bahkan setelah empat tahun diwajibkan dalam implementasinya. Masalah teknis yang dihadapi adalah penilaian yang tidak tepat dan kekurangan staf yang memenuhi syarat (Yuliati *et al.*, 2019). Kendala lainnya bahwa sistem informasi akuntansi akrual tidak diterapkan secara penuh, tidak terintegrasi dengan perencanaan dan subsistem asset, pemahaman yang rendah dan jumlah karyawan yang kurang pendidikan akuntansi, pengungkapan dalam laporan keuangan tidak penuh, tidak disajikan secara lengkap dan valid, peraturan belum mengatur penggunaan informasi dalam laporan keuangan, komitmen eksekutif dan legislatif yang rendah dan pemahaman tentang penggunaan informasi laporan keuangan untuk pengambilan keputusan (Efendi *et al.*, 2018). Latar belakang pendidikan, kepemimpinan, pengalaman menggunakan basis akrual, kompleksitas, dan kekayaan pemerintah daerah memiliki efek positif pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual (Pramudiati & Siregar, 2018). Hasil penelitian Nugraheni dan Subaweh (2008) menunjukkan adanya pengaruh penerapan SAP terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut juga membuktikan adanya pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

6. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas memberikan fakta empiris bahwa penerapan akuntansi akrual dalam penyusunan laporan keuangan di PTKIN berstatus BLU belum sepenuhnya sesuai dengan SAP dan SAK. Penerapan akuntansi akrual dalam hal definisi, pengelola keuangan dalam hal ini Kabag keuangan, operator SAIBA dan SAK sudah bisa mendefinisikannya sesuai dengan standar akuntansi. Transaksi akuntansi masih diakui berdasarkan prinsip atau basis kas, meskipun sudah ada yang berbasis akrual. Transaksi diukur menggunakan nilai historis, nilai bruto, nilai nominal dan juga nilai pasar. Pencatatan atau jurnal yang dibuat untuk setiap transaksi akuntansi disusun berdasarkan basis kas dan sebagian berbasis akrual. Laporan keuangan disajikan sudah sesuai dengan SAP dan SAK. Sedangkan pengungkapan dalam CALK masih belum lengkap seperti yang diminta dalam standar akuntansi. Akuntansi akrual masih belum diterapkan sepenuhnya dikarenakan beberapa kendala. Kendala tersebut diantaranya masih belum ada aplikasi khusus untuk SAK, kurangnya sumber daya manusia dan aturan kementerian keuangan terkait penyusunan laporan keuangan BLU yang sering berubah.

Rekomendasi yang dapat diberikan pada PTKIN berstatus BLU adalah perlunya pembuatan *software* khusus laporan keuangan berbasis SAK (tidak lagi excel). Perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan bagi operator-operator yang menyusun laporan keuangan karena kompetensi mereka sangat menentukan kesuksesan sebuah sistem keuangan. Penelitian ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan dalam hal ini kementerian keuangan dan IAI untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan yang memadai pada penyusun laporan keuangan saat ada perubahan dalam standar akuntansi. Bagi PTKIN berstatus BLU, hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran dalam penerapan akuntansi akrual, kendala serta apa yang harus dilakukan untuk bisa sukses dalam penerapannya. Penelitian ini memiliki keterbatasan khususnya dalam melaksanakan observasi yang tidak bisa dilakukan secara intensif diakibatkan oleh pandemic Covid 19 sehingga terdapat pembatasan. Penelitian berikutnya bisa membandingkan beberapa PTKIN berstatus BLU dalam penerapan akuntansi akrual, untuk bisa memberikan gambaran pada lebih banyak objek penelitian yang mungkin hasilnya akan berbeda.

Ucapan Terima Kasih:

Terima kasih kami ucapkan kepada LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim yang telah mendanai penelitian Litapdimas ini dari dana BOPTN 2020.

Daftar Pustaka

- Andriani, P. N., & Setyowati, E. (2021). Akuntabilitas Kinerja Bidang Pertamanan DISPERKIM Kota Malang dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 7(1), 113–120.
- Argento, D., Dobija, D., & Grossi, G. (2020). The disillusion of calculative practices in academia. *Qualitative Research in Accounting and Management*, 17(1), 1–17. <https://doi.org/10.1108/QRAM-12-2019-0130>
- Arifin, J. (2020). Determinan Kecurangan Akuntansi Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(2), 187–204. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i2.4035>
- Ariyati, R., Pinasti, M., & Kencono Putri, N. (2016). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Universitas. *Universitas Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 4, 1–28.
- Aversano, N., Christiaens, J., & Van Thielen, T. (2019). Does IPSAS Meet Heritage Assets' User Needs? *International Journal of Public Administration*, 42(4). <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1433205>
- Botica Redmayne, N., Laswad, F., & Ehalaiye, D. (2019). Evidence on the costs of changes in financial reporting frameworks in the public sector. *Public Money and Management*, 0(0), 1–8. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1679482>
- Characteristics, L. G., & Performance, G. (2018). Local Government Characteristics, Adoption of Accrual Accounting, and Government Performance. *The Journal of Social Sciences Research, SPI*, 2, 153–160. <https://doi.org/10.32861/jssr.spi2.153.160>
- Choirudin, N. I. (2018). Peranan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Efektivitas Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Pada Enhaii Hotel Bandung. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 2(1), 41–50. <https://doi.org/10.34013/jk.v2i1.20>
- Connolly, C., & Hyndman, N. (2006). The actual implementation of accruals accounting: Caveats from a case within the UK public sector. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 19(2), 272–290. <https://doi.org/10.1108/09513570610656123>
- Efendi, R., Dewi, F. G., & Gamayuni, R. R. (2018). Usefulness analysis of accrual based accounting information on local government financial statement: A qualitative study. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 7(11), 10–21.
- Harun, H., Carter, D., Mollik, A. T., & An, Y. (2020). Understanding the forces and critical features of a new reporting and budgeting system adoption by Indonesian local government. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 16(1), 145–167. <https://doi.org/10.1108/JAOC-10-2019-0105>
- Harun, H., & Kamase, H. P. (2012). Accounting Change and Institutional Capacity: The Case of a Provincial Government in Indonesia. *Business and Finance Journal*, 6(2), 35–50.
- Harun, H., Van-Peursem, K., & Eggleton, I. R. C. (2015). Indonesian public sector accounting reforms: Dialogic aspirations a step too far? *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 28(5), 706–738. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2012-1182>
- Hasan, H. A., Saleh, Z., & Isa, C. R. (2013). *Change Towards Accrual Accounting : Perception of Top Management in the Malaysian Federal Government 1. 3*, 101–112.
- Hastuti, H., Burhany, D. I., Rufaedah, Y. R., Mai, M. U., & Rochendi, H. R. (2021). Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Piutang Pada Perguruan Tinggi Negeri (Suatu Studi Kasus). *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(1), 75–87. <https://doi.org/10.34010/jra.v13i1.4454>
- Jayasinghe, K., Nath, N. D., & Othman, R. (2015). The public sector accounting, accountability and auditing in emerging economies: Insights, gaps and some new ways forward. *Research in Accounting in Emerging Economies*, 15, 1–6. <https://doi.org/10.1108/S1479-356320150000015001>
- K. Matekele, C., & V. Komba, G. (2020). Factors Influencing Implementation of Accrual Based International Public Sector Accounting Standards in Tanzanian Local Government Authorities. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 13(3), 1–

25. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2019/v13i330173>
- Larasati, I. dkk. (2016). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pencatatan Dan Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Muqim Sunnah*. x, 3. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2005.04.001>
- Matekele, C. K., & Komba, G. V. (2020). Factors Influencing Implementation of Accrual Based International Public Sector Accounting Standards in Tanzanian Local Government Authorities. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 13(3), 1–25. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2019/v13i330173>
- Najati, I., Pituringsih, E., & Animah. (2016). Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua: Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 14(1), 1–18.
- Nitzl, C., Hilgers, D., Hirsch, B., & Lindermüller, D. (2020). The Influence of the Organizational Structure, Environment, and Resource Provision on the Use of Accrual Accounting in Municipalities. *Schmalenbach Business Review*, February. <https://doi.org/10.1007/s41464-020-00086-y>
- Novianta, E. N. (2018). Digital Digital Repository Universitas Universitas Jember. *Monopoli Dan Persainganm Usaha Tidak Sehat Pada Perdagangan Produk Air Minum Dalam Kemasan*, 1(3), 1–56.
- Nurmalasari, I., Jamil, Z. L., & Hidayat, A. (2019). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Bandung Inten Nurmalasari , Zamzam Lukmanul Jamil, Ara Hidayat UIN Sunan Gunung Djati Bandung *Dirāsāt: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 5(1), 1–19.
- Polzer, T., Gårseth-Nesbakk, L., & Adhikari, P. (2019). “Does your walk match your talk?” Analyzing IPSASs diffusion in developing and developed countries. *International Journal of Public Sector Management*, 33(2–3), 117–139. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-03-2019-0071>
- Ratmono, D., & Sutrisno. (2019). Financial statements quality of central government entities: A test of institutional and agency theories. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(3), 1–15.
- Ryan, C., Mellett, H., Moll, J., & Hoque, Z. (2008). New organizational forms and accounting innovations: The specifier/provider model in the Australian public sector. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 4(3), 243–269. <https://doi.org/10.1108/18325910810898052>
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis Unpar*, 4(1), 14–33.
- Sulistiani, D. (2019a). Akuntansi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik. *Bisnis Dan Sosial*, 1–10.
- Sulistiani, D. (2019b). Peningkatan Akuntabilitas Publik Melalui Sistem Informasi Akuntansi pada Pondok Pesantren Salafiyah. *Akuntabilitas*, 12(2), 237–248. <https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.9662>
- Sulistiani, D. (2020). Akuntansi Pesantren Sesuai SAK ETAP dan PSAK 45 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pesantren. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i1.7198>
- van Wyk, H. A. (2019). Is the transformation of public sector financial reporting in South Africa’s provincial governments on track? *Meditari Accountancy Research*, 65–75. <https://doi.org/10.1108/10222529200700011>
- Wibowo, P., & Varikha, N. (2018). Transformasi Pelaporan Keuangan Basis Akrua pada Politeknik Keuangan Negara STAN: Sudahkah Tuntas? *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 2(1), 97. <https://doi.org/10.35837/subs.v2i1.276>
- Yulianti, R., Yuliansyah, Y., & Adelina, Y. E. (2019). The implementation of accrual basis accounting by Indonesia’s local governments. *International Review of Public Administration*, 24(2), 67–80. <https://doi.org/10.1080/12294659.2019.1603954>